



PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL  
INDONESIA SEKTOR JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia dan Tanda Kesesuaian Berbasis Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan.
2. Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang menyatakan bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Persyaratan Acuan.
5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
6. Transfer Sertifikasi adalah pengalihan Sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu lembaga Sertifikasi produk penerbit Sertifikat kepada lembaga Sertifikasi produk penerima Sertifikat.
7. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
8. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 2

- (1) Skema Penilaian Kesesuaian yang diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi terhadap jasa berdasarkan Persyaratan Acuan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.
- (3) Dalam hal LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, BSN dapat menunjuk LSPro dengan ruang lingkup yang sejenis.

#### Pasal 3

Penerapan Skema Penilaian Kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi usaha mikro dan kecil yang mencakup:

- a. ruang lingkup dan lokasi usaha;
- b. jumlah personel;
- c. risiko ketidaksesuaian; dan
- d. kompleksitas layanan.

### BAB II PERSYARATAN ACUAN

#### Pasal 4

Persyaratan Acuan Sertifikasi sektor jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

### BAB III PROSEDUR ADMINISTRATIF

#### Pasal 5

Prosedur administratif berisi ketentuan:

- a. pengajuan Sertifikasi yang meliputi:
  1. permohonan Sertifikasi; dan
  2. kelengkapan permohonan Sertifikasi.
- b. seleksi yang meliputi:
  1. tinjauan permohonan Sertifikasi;
  2. penandatanganan perjanjian Sertifikasi; dan
  3. penyusunan rencana evaluasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan format permohonan Sertifikasi oleh LSPro yang berisi seluruh informasi pemohon, informasi jasa, dan informasi proses penyediaan jasa, untuk diisi oleh Pelaku Usaha; dan
  - b. pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengajukan permohonan Sertifikasi sesuai dengan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

#### Pasal 7

Kelengkapan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit berupa:

- a. informasi pemohon, yang terdiri atas:
  1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
  2. dokumen legalitas operasional jasa dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bukti kepemilikan merek jasa atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal pemohon memegang hak berdasarkan hukum terhadap jasa dan merek jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dalam hal sesuai;
  4. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia dalam hal pemohon yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia merupakan pemegang hak berdasarkan hukum terhadap jasa dan merek jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dalam hal sesuai; dan
  5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;
- b. informasi jasa, yang terdiri atas:
  1. nama dan alamat penyedia jasa;
  2. tipe/jenis/klasifikasi/golongan/kategori jasa;
  3. rancangan jasa;
  4. nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai Persyaratan Acuan;
  5. foto tempat penyedia jasa;
  6. profil usaha; dan
  7. laporan hasil pengujian terhadap hasil pemberian jasa, dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian; dan

- c. informasi proses penyediaan jasa, yang terdiri atas:
  - 1. struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab penyediaan jasa;
  - 2. informasi terkait pengelolaan dan pengendalian mutu penyediaan jasa yang mencakup bukti pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI;
  - 3. dalam hal tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan:
    - a. SNI ISO 9001 atau ISO 9001 atau standar lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN; atau
    - b. ISO 9001, atau standar internasional lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement* dengan ruang lingkup yang sesuai.

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan tinjauan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, LSPro harus memastikan:

- a. informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- b. kemampuan untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan
- c. dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

#### Pasal 9

- (1) Penandatanganan perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, dilakukan setelah:
  - a. permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan; dan
  - b. pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro.
- (2) Perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.

#### Pasal 10

- (1) LSPro menyusun rencana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan Sertifikasi.
- (2) Rencana evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas tujuan, waktu, lingkup Sertifikasi, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda yang mencakup:
  - a. inspeksi terhadap proses penyediaan jasa;
  - b. inspeksi terhadap hasil penyediaan jasa;
  - c. audit sistem manajemen pemberian jasa; dan
  - d. pengujian terhadap hasil pemberian jasa dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian.

- (3) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian jasa yang disediakan oleh pelaku usaha sesuai lingkup jasa yang diajukan untuk disertifikasi;
- (4) Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi:
  - a. pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik, dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011;
  - b. pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
  - c. pemahaman mengenai standar sistem manajemen yang relevan;
  - d. pengetahuan mengenai SNI jasa yang diajukan untuk Sertifikasi;
  - e. pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor bisnis jasa yang diajukan untuk Sertifikasi;
  - f. pengetahuan mengenai proses penyediaan jasa sesuai dengan lingkup SNI; dan
  - g. pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jasa yang diajukan untuk sertifikasi.

#### Pasal 11

Dalam hal pemohon Sertifikasi merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sertifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dengan metode:
  1. luring; atau
  2. daring.
- b. dilakukan oleh auditor atau tim audit dengan waktu yang digunakan:
  1. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari;
  2. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau
  3. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari.

### BAB IV

#### JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk jasa dilakukan dengan tahapan:

- a. determinasi;
- b. tinjauan; dan
- c. penetapan.

##### Bagian Kedua Determinasi

#### Pasal 13

Determinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 14

- (1) LSPro melakukan evaluasi tahap 1 (satu) untuk memastikan dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi LSPro menyatakan pemenuhan terhadap kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro dapat melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2 (dua).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal pemohon dapat menyelesaikan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro melanjutkan proses ke evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 15

- (1) Evaluasi tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi terhadap proses penyediaan jasa;
  - b. inspeksi terhadap hasil penyediaan jasa;
  - c. audit sistem manajemen penyediaan jasa; dan
  - d. pengujian terhadap hasil pemberian jasa dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian.
- (2) Kegiatan evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.
- (3) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada jam operasional atau saat pelaku usaha melakukan proses penyediaan jasa dan/atau melalui simulasi proses penyediaan jasa.
- (4) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu dengan ruang lingkup yang sesuai berdasarkan:
  - a. SNI ISO 9001 atau ISO 9001 atau standar lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN; atau
  - b. ISO 9001 atau standar internasional lain terkait sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement* dengan ruang lingkup yang sesuai.tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen penyediaan jasa.
- (5) Dalam hal dilakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua) maka:
  - a. pengujian dilakukan oleh laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025;

- b. penerapan ISO/IEC 17025 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibuktikan melalui akreditasi oleh:
    - 1. KAN; atau
    - 2. Badan akreditasi penandatanganan *International Laboratory Accreditation Cooperation/Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement*;
  - c. dalam hal belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025; dan
  - d. dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, LSPro:
    - 1. melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan
    - 2. memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian
- (6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- (7) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

### Bagian Ketiga Tinjauan

#### Pasal 16

- (1) Tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan tahap determinasi.
- (2) Tinjauan harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses determinasi.
- (3) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk jasa yang diajukan Sertifikasi termasuk rekomendasi tipe/jenis/klasifikasi/golongan/kategori jasa dalam hal sesuai.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 17

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi; atau
  - b. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- (3) Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi.
- (4) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penerbitan Sertifikat kesesuaian;
  - b. penundaan penerbitan Sertifikat Kesesuaian; atau
  - c. tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak diterbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dan huruf c, LSPro harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan kepada LSPro untuk melanjutkan proses Sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan.
- (3) Proses Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan mulai dari evaluasi tahap 2 (dua).

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c pemohon dapat mengajukan permohonan kembali kepada LSPro.
- (2) Terhadap pemohon yang mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

### BAB V BUKTI KESESUAIAN

#### Pasal 20

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi diberikan bukti kesesuaian berupa Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a.
- (2) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSPro dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
  - a. nomor Sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
  - b. nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi;
  - c. nama dan alamat LSPro;

- d. nama dan alamat pemegang Sertifikat;
- e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
- f. pernyataan kesesuaian yang mencakup :
  - 1. merek jasa yang disertifikasi, dalam hal sesuai;
  - 2. tipe/jenis/klasifikasi/golongan/kategori jasa/jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
  - 3. nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
  - 4. nama dan alamat usaha;
- g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
- h. tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat sesuai masa berlakunya;
- i. riwayat Sertifikat dalam hal terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan
- j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

### Pasal 21

- (1) LSPro melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI atas jasa yang telah disertifikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan surveilans.
- (3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara:
  - a. luring; atau
  - b. daring.
- (4) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui evaluasi berupa:
  - a. inspeksi terhadap proses penyediaan jasa;
  - b. inspeksi terhadap hasil penyediaan jasa;
  - c. audit sistem manajemen penyediaan jasa; dan/atau
  - d. pengujian terhadap hasil pemberian jasa dalam hal jenis jasa membutuhkan pengujian.
- (5) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi.

## BAB VII SERTIFIKASI ULANG

### Pasal 22

- (1) LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemegang Sertifikat kesesuaian untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir.

- (3) Dalam hal tidak ada perubahan yang signifikan terkait jasa dan proses penyediaan jasa sesuai dengan hasil audit terakhir:
  - a. kegiatan determinasi dimulai pada evaluasi tahap 2 (dua); dan
  - b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan:
    1. audit dokumen/rekaman; dan/atau
    2. audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan Sertifikasi ulang.

## BAB VIII EVALUASI KHUSUS

### Pasal 23

- (1) LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi, atau keluhan yang diterima oleh LSPro sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi.
- (2) Evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. auditor memiliki kompetensi terkait pelaksanaan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi; dan
  - c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi, atau keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat jasa yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan, LSPro:
  - a. melaporkan kepada BSN; dan
  - b. melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Pelaku Usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi.
- (5) Pelarangan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan penggunaan kembali tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

BAB IX  
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Pemohon dapat mengajukan penambahan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.
- (2) Penambahan lingkup Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19.
- (3) Evaluasi terhadap penambahan lingkup Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

Pasal 25

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan pengurangan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSPro melakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro menerbitkan Sertifikat kesesuaian yang sudah dikurangi lingkup Sertifikasinya.

BAB X  
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT KESESUAIAN

Pasal 26

- (1) LSPro membekukan Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang:
  - a. menolak untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
  - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi berdasarkan hasil surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu perbaikan yang disepakati;
  - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikat kesesuaian kepada LSPro; atau
  - d. terindikasi melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus.
- (2) Pembekuan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LSPro mengaktifkan kembali Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang Sertifikat kesesuaian:
  - a. telah bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. telah memenuhi kesesuaian persyaratan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

#### Pasal 27

LSPro melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian dalam hal pemohon:

- a. tetap tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikat kesesuaian kepada LSPro; atau
- d. terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan evaluasi khusus.

### BAB XI

#### KELUHAN DAN BANDING

#### Pasal 28

- (1) Pemohon dapat mengajukan keluhan atau banding dalam proses Sertifikasi atau hasil penetapan Sertifikasi kepada LSPro.
- (2) LSPro menerapkan mekanisme penanganan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

### BAB XII

#### INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 29

- (1) LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.
- (2) Informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama dan merek produk;
  - b. pemilik Sertifikat kesesuaian; dan
  - c. status Sertifikat kesesuaian.

### BAB XIII

#### TRANSFER SERTIFIKASI

#### Pasal 30

- (1) Transfer Sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan Sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPro penerbit kepada LSPro penerima.
- (2) Transfer Sertifikasi dapat dilakukan dalam hal:
  - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
  - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSPro penerbit berkoordinasi dengan LSPro penerima.

- (4) Dalam hal Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- (5) Untuk mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi, pemohon paling sedikit melengkapi dokumen:
  - a. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau salinannya yang masih berlaku; dan
  - b. hasil audit dari LSPro penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang, dan/atau surveilans yang sedang berjalan.
- (6) Berdasarkan permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LSPro penerima melakukan:
  - a. evaluasi terhadap permohonan Transfer Sertifikasi berkoordinasi dengan LSPro penerbit; dan
  - b. menetapkan keputusan Transfer Sertifikasi.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan Transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- (9) LSPro penerima berkoordinasi dengan LSPro penerbit mengenai keputusan diterima atau ditolaknya Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerbit.
- (10) Dalam hal permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai Transfer Sertifikasi melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

#### BAB XIV PENGUNAAN TANDA SNI

##### Pasal 31

- (1) Pemegang Sertifikat kesesuaian mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI kepada BSN.
- (2) Persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- (3) Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan

- tanda SNI dan tanda kesesuaian, serta aturan turunannya.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran tanda SNI mengacu pada Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
  - (5) Penggunaan tanda SNI dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya dengan cara:
    - a. penandaan yang tidak mudah hilang; dan
    - b. ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.
  - (6) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk membubuhkan atribut tambahan pada tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format atribut tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Untuk jasa yang sudah memperoleh surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penggunaan tanda SNI.
- (2) Permohonan proses Sertifikasi jasa yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923);
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018);
- c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);
- d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164); dan

- e. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 564),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2024



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR